

ABSTRAK

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa perlu diperhatikan, karena dalam hal ini Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, tugas dan fungsi Pemerintahan Desa di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 Tentang Desa. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya yang di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, pastilah Pemerintahan Desa khususnya Desa Sidomukti mempunyai faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Sidomukti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa dan mengetahui faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Sidomukti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian mengadakan penelitian data primer di lapangan. Faktor yuridis adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2010 Tentang Desa. Faktor empirisnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Sidomukti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan adalah bahwa Pemerintahan Desa Sidomukti terdiri dari Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Sidomukti ditemukan beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung.

Kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Sidomukti sudah sesuai dengan yang di atur dalam Perda Kabupaten Bojonegorr Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa. Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa antara lain : kurangnya kesadaran masyarakat tentang jam kerja, hanya ada beberapa anggota dalam suatu lembaga Desa yang aktif menjalankan kegiatan sedangkan faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa antara lain jumlah perangkat Desa yang lengkap dan adanya BPD yang mengawasi Pemerintah Desa.

Kata kunci : *Pelaksanaan Tugas dan fungsi, Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah*